



PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA

(Studi Empiris Perusahaan Properti dan Real Estate listing di Bursa Efek Indonesia)

Oleh :

Heni Pujiastuti

ABSTRACT

This study aim to examine the effect of good corporate governance, audit quality, and size company against earning management. Data used in this study is annual report and audited financial report from each company, published through website www.idx.co.id. The sample used in this study are property and real estate companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2013 up to 2015 resulted 96 observations. The Study shows that audit quality have the significant and negative impact toward earning management. While independent commissioner, institutional shares, managerial shares and size company haven't significant effect toward earning management.

Keywords : good corporate governance, audit quality, company size, earning management

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan menjadi sorotan penting bagi sebuah perusahaan terbuka terutama di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator untuk perusahaan terbuka terus mengembangkan peraturan dan pedoman mengenai tata kelola perusahaan yang baik sejak 2014 untuk memberikan kontribusi positif sehingga Indonesia sejajar dengan negara-negara lainnya seperti yang tertera dalam salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Peraturan dimaksud mewajibkan bagi setiap perusahaan terbuka yang listing di Indonesia untuk melaksanakannya dan menerapkan prinsip yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama yang diinginkan adalah adanya transparansi informasi keuangan yang terkait dengan operasional perusahaan antara pemilik dana atau principal dan pengelola keuangan atau agen.

Perkembangan perekonomian yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan pergerakan tingkat suku bunga bank di Indonesia berada pada level 7,50% dan inflasi berada pada posisi 3,25% medio Februari 2018. Angka yang dinilai cukup signifikan peningkatannya dibandingkan dengan Desember 2017 yaitu sebesar 4,97% untuk tingkat suku bunga dan penurunan nilai

inflasi sebesar 0,36%. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas infrastruktur yang sudah terbangun secara merata dikawasan seluruh Indonesia. Salah satu sektor industri di Indonesia yang dianggap terus berkembang adalah sektor properti dan real estate. Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat di dunia diperkirakan terdapat 245 juta jiwa. Hal itu yang menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin diminati. Oleh karena itu perusahaan sektor properti dan real estate menjadi terpacu untuk terus berkembang.

Melalui peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang kian berkembang setiap waktunya membuat perusahaan properti dan real estate harus pandai memanfaatkan peluang tersebut. Karena kesempatan ini menjadi ajang bagi perusahaan untuk menaikkan kinerjanya menjadi lebih baik. Untuk itu banyak perusahaan properti dan real estate yang mencatatkan sahamnya di bursa efek dengan kondisi *bullish*, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon investor untuk menanamkan modalnya.

2. LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Agency Theory

Masalah *corporate governance* berakar dari pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. **Jesen dan Meckling (1976)** dalam teori keagenan

* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute

(*agency theory*), yang disebut dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik dan *agent* adalah manajemen atau manajer yang mengelola perusahaan. Adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*.

Secara umum tujuan manajemen dan pemegang saham biasanya tidak berbeda. Keduanya bertujuan memaksimalkan keuntungan dan menaikkan pertumbuhan pendapatan serta harga saham perusahaan. Manajemen sebagai *agent* memiliki tanggung jawab dalam operasional perusahaan sehari-hari dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki manajemen.

Dalam lingkup ini *agent* memiliki lebih banyak informasi perusahaan dan lingkungan kerja lebih banyak daripada *principal*. Hal ini dapat mendorong *agent* untuk menyajikan hal yang tidak sebenarnya kepada *principal* terutama informasi-informasi yang digunakan *principal* sebagai alat pengukur kinerja *agent*. Dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan *agent* sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai mengukur dan mengawasi sampai sejauhmana modal yang mereka berikan dikelola secara tepat dan menguntungkan.

Masalah muncul ketika terdapat informasi yang bersifat asimetri, baik yang berupa *Adverse Selection* dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh atau merupakan sebuah kelalaian maupun *Moral Hazard* dimana agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati yang merupakan keinginan prinsipal menurut Jensen dan Meckling, 1976. Secara umum kebijakan akuntansi dalam manajemen laba terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama manajemen menggunakan keleluasaannya untuk memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuannya dan kelompok kedua adalah penggunaan akrual diskresioner.

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur dan menjadi alat untuk monitoring agen terhadap informasi yang dilaporkan kepada *principal* sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasi dengan wajar dan bernilai tinggi, dan pihak manajemen tidak akan mencuri atau menggelapkan serta menginvestasikan modal yang diberikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi investor.

2.2. *Good Corporate Governance*

Kerangka tata kelola perusahaan merupakan fondasi untuk implementasi efektif dari tata kelola yang baik. World Bank (2010) dalam roadmap tata kelola perusahaan Indonesia oleh OJK (2015) mendefinisikan makna tata kelola perusahaan sebagai suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Menurut BPKP (2011) perusahaan yang menerapkan praktek *good corporate governance* telah berupaya meminimalkan resiko keputusan yang salah atau menggantungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesejahtraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Setiap perusahaan publik harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Asas-asas *good corporate governance* dalam KNKG (2006) antara lain:

- a. **Transparansi (*Transparency*)**
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jenis jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- b. **Tanggungjawab (*Responsibility*)**
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. **Independensi (*Independency*)**
Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi, tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- d. **Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)**
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.

2.3. Kualitas Audit

Kualitas Audit (*audit quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo dalam Chandra Jeni,

2014). Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor itu tersebut. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001, audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Berdasarkan dari teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini auditor independen. Investor akan jauh cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. (Beasley, Jiambalvo, dan Subramanyam, 1998; Li Dang Et al, 2004).

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *long size*, nilai pasar saham, dan lain.lain (Anggraini, 2012). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 katagori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Menurut Yan (2006), ukuran perusahaan diukur berdasarkan aset dan penjualan. Semakin besar aset dan penjualannya semakin besar ukuran perusahaannya. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berdampak terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan depan. Sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak yang diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan masyarakat secara umum.

2.5. Manajemen Laba

Laporan keuangan dapat menjadi kurang andal (*reliable*) karena terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh standar akuntansi yang ada. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah fleksibilitas penerapan metode akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai peluang untuk menyusun

metode akuntansi yang dipilih dan penentuan waktu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat *discretionary* dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba, yaitu dengan menunda atau mempercepat pengeluaran-pengeluaran serta mengesernya pada periode selanjutnya.

Hal inilah yang digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba (*earnings management*) terhadap laporan keuangan perusahaan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam standar akuntansi.

Cahan et al. (2008) menyatakan perataan laba merupakan salah satu jenis dari tindakan manajemen laba. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi periodik laba dari waktu ke waktu. Schroeder (2009) menyatakan bahwa praktik perataan laba merupakan praktik umum yang dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunnya (fluktuasi) laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen.

Menurut Iqbal dan Nurul 2005, manajemen laba (*earning management*) dipandang sebagai salah satu bentuk manipulasi kinerja perusahaan dan merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan.

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT) dan *Agency Theory*. Tiga hipotesis PAT yang didasarkan pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan Watts & Zimmerman dalam Anggi Ratna Anggraini (2013):

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

2. *The Debt to Equity Hypotesis (Debt Covenant Hypotesis)*

Pada perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

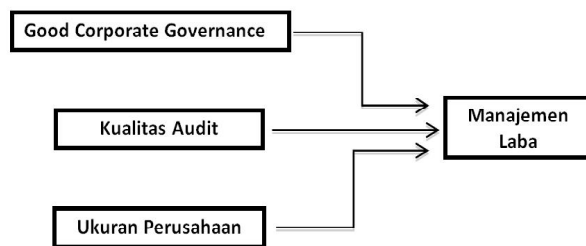
3. *The Political Cost Hypotesis (Size Hypotesis)*
Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik yang tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggukhan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa jurnal di atas, dengan mengukur kemampuan perusahaan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance*, kualitas audit dan ukuran perusahaan, penelitian ini ingin menjawab apakah praktek manajemen laba masih dilakukan bagi perusahaan real estate dan property yang menjadi sampel dalam pembuktian tersebut. Oleh karena itu kerangka pemikiran yang digunakan untuk pembahasan selanjutnya adalah.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estat yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan properti yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015 berturut-turut.
2. Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
3. Perusahaan tersebut tidak mengalami transaksi merger selama periode penelitian yaitu selama tahun 2013-2015.
4. Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2015.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan masing-masing perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Yang diperoleh melalui website BEI www.idx.co.id.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik dokumentasi, yaitu mempelajari, mengklasifikasi dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan properti yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-2015.

3.2. Metode Analisis Data

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dengan proksi dengan *discretionary accrual* menggunakan *modified Jones Models* dengan langkah perhitungan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan total akrual dengan rumus berikut:
 $TA_{it} = Nit - CFO_{it}$
2. Setelah mendapatkan nilai total akrual, selanjutnya melakukan regresi linier sederhana untuk mendapatkan koefisien dengan menggunakan:
 $TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e$
3. Dengan menggunakan koefisien hasil regresi diatas maka selanjutnya dapat dihitung nilai NDA (*non discretionary accruals*) dengan rumus :
 $NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$
4. Setelah mendapatkan nilai TA dan NDA, nilai DA dapat dihitung dengan
 $DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan instisional, dan kepemilikan manajerial, kualitas audit dan ukuran perusahaan. Komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris. Kepemilikan instisional diukur dengan cara mengambil proporsi saham yang beredar diluar kepemilikan grup, afiliasi atau keluarga. Kepemilikan manajerial diukur dengan cara mengambil proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh manajemen kunci perusahaan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, diberi angka 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP afiliasi *big four* dan angka 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP non afiliasi *big four*. Sedangkan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan.

Pada penelitian ini pengujian model hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$DA = \alpha + \beta_1 KOI + \beta_2 KI + \beta_3 KM + \beta_4 KA + \beta_5 TA + e$$

Keterangan :

DA : *Discretionary Accrual* proksi manajemen laba
 α : Konstanta
 KOI : Komisaris Independen
 KI : Kepemilikan Instisional
 KM : Kepemilikan Managerial
 KA : Kualitas Audit
 TA : Ukuran Perusahaan
 e : Koefisien Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah 44 perusahaan. Dari seluruh perusahaan tersebut kemudian dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Dari hasil *purposive sampling* ini diperoleh 32 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam 3 tahun sehingga terdapat 96 sampel dalam penelitian ini.. Dari total 44 perusahaan tersebut terdapat enam perusahaan yang baru listing di BEI yaitu PT Sitara Propertindo Tbk (TARA) yang listing di tahun 2014 dan PT PP Property Tbk (PPRO), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), dan PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA) yang baru listing di tahun 2015. Selama periode penelitian 2013-2015 terdapat juga satu perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangannya ke BEI yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) yang belum melaporkan laporan tahunan perusahaan untuk periode 2015.

Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2013-2015 yaitu delapan perusahaan yaitu PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) yang mengalami kerugian ditahun 2013, PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP), PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Metro Realty Tbk (MTSM), PT Nirvana Development Tbk (NIRA), PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE) dan PT Rista Bintang Makhkota Sejati Tbk (RBMS) yang mengalami kerugian di tahun 2015.

Berdasarkan total perusahaan yang memenuhi kriteria untuk penelitian yaitu sebanyak 32 perusahaan dan jumlah periode yang diambil yaitu selama tiga tahun (periode 2013-2015), Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 96 sampel.

Variabel manajemen laba rata-rata dari 96 sampel memiliki nilai sebesar 0,4029. Hal ini berarti bahwa dari total keseluruhan sampel atas perusahaan properti dan real estat rata-rata melakukan manajemen laba dengan nilai *discretionary accrual*

sebesar 0,4029. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba terbesar adalah PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) tahun 2013 sebesar 0,7067. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba terendah dalam sampel adalah PT Goa Makassar Torism Development Tbk (GMTD) tahun 2013 sebesar 0,0656.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISCRETIONARY ACCRUAL (DA)	96	0,0656	0,7067	0,4029	0,1462
KOMISARIS INDEPENDEN (KOI)	96	0,3000	0,7500	0,3986	0,0987
KEPEMILIKAN INSTISIONAL (KI)	96	0,0711	0,8188	0,3644	0,1996
KEPEMILIKAN MANAGERIAL (KM)	96	0	0,1186	0,0088	0,0254
KUALITAS AUDIT (KA)	96	0	1,0000	0,0344	0,4775
Ln TOTAL ASET (TA)	96	18,9800	24,4400	22,2142	1,3290

Komisaris independen dalam rata-rata sampel memiliki 39,86% proporsi komisaris independen dari total komisaris yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen terbesar adalah PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) selama periode 2013 dan 2014 dengan total proporsi komisaris independen sebesar 75% atau enam orang dari delapan orang total komisaris. Sedangkan perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen terendah adalah PT Goa Makassar Torism Development Tbk (GMTD) yang memiliki total proporsi komisaris independen sebesar 30% atau tujuh orang dari 10 orang total komisaris.

Rata-rata dari seluruh sampel perusahaan properti dan real estat memiliki kepemilikan instisional sebesar 36,44% . Sedangkan rata-rata dari seluruh sampel perusahaan properti dan real estat di BEI managerial yang memiliki saham hanya sedikit yaitu hanya sebesar 0,88% dari saham yang beredar. Kepemilikan managerial tertinggi dari 96 sampel yang diteliti adalah PT Pudjiati Prestige Tbk (PUDP) untuk periode 2013-2015 yang memiliki kepemilikan managerial sebesar 11,86% sedangkan yang terendah yaitu yang tidak memiliki kepemilikan managerial yaitu 18 emiten dari seluruh sampel yang diambil.

Dari total seluruh sampel terdapat 33 sampel (34,38%) diaudit oleh KAP *big four*, dan sisanya 63 sampel (65,62%) diaudit oleh KAP *non big four*. Nilai ln dari total aset rerata sampel sebesar 22,2142. Nilai terbesar dalam sampel adalah PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada periode 2015 yang memiliki nilai total aset sebesar Rp 41.326.558.178 ribu atau nilai ln total aset 24,44. Sedangkan nilai terkecil dalam sampel adalah PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) memiliki total aset sebesar Rp 175.743.601 ribu atau nilai ln total aset sebesar 18,98.

4.1. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai *t* hitung sebesar -0,146 dengan nilai signifikansi 0,885 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba.

Hal ini berarti, banyaknya komposisi komisaris independen dalam perusahaan belum berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya komposisi komisaris independen bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektifitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan tetapi efektifitas mekanisme pengendalian tergantung kepada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktifitas pengendalian terhadap manajemen. Selain itu perusahaan-perusahaan di Indonesia diikat oleh UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perusahaan publik memiliki 30% komisaris independen. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha mengikuti regulator untuk menghindari sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan.

Tabel 2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.	Ket.
	<i>B</i>			
1 (Constant)	.520	1.596	.000	
KOI	-.034	-.146	.885	Tidak Signifikan
KI	-.025	-.232	.818	Tidak Signifikan
KM	.006	.932	.359	Tidak Signifikan
KA	-.090	-2.160	.039	Signifikan
TA	-.001	-.045	.964	Tidak Signifikan

Komisaris Independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba juga dikarenakan komisaris independen ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 sehingga apabila jika tidak sejalan dengan keputusan pemilik maka perusahaan akan melakukan pergantian dengan segera melaksanakan RUPS serta menimbulkan agency problem. Jadi pada praktikanya komisaris independen tidak benar-benar independen dalam melaksanakan tugas dan pengawasannya karena terbatas oleh peraturan/kebijakandari pemegang saham mayoritas, sehingga tidak dapat mendorong pelaksanaan good corporate governance secara optimal untuk membatasi praktik manajemen laba. Ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Tsani (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap tindak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai *t* hitung untuk kepemilikan instisional sebesar -0,232 dengan nilai signifikansi 0,818 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa terdapat tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan instisional dengan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Agustia (2013). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan instisional tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi praktik manajemen laba. Investor Instisional yang memiliki kepemilikan saham yang lebih besar dibandingkan kepemilikan saham yang dimiliki grup atau keluarga seharusnya memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengontrol kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat mempersempit ruang manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Tetapi pada kenyataannya investor di luar kepemilikan grup dan keluarga tidak bisa membatasi terjadinya manajemen laba. Hal ini dikarenakan bahwa investor di luar grup dan keluarga sebagian besar merupakan transient investor yang merupakan investor yang berfokus pada capital gain dan sinyal-sinyal secara grafik bukan secara fundamental. Sehingga para investor tersebut tidak berfokus dalam memonitor management agar terfokus pada nilai perusahaan, serta membatasi management dalam melakukan praktik manajemen laba. Oleh karena itu kepemilikan instisional belum tentu dapat meningkatkan pengawasan yang berpengaruh terhadap berkurangnya praktik manajemen laba. Hal ini berbeda dengan penelitian Tsani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dapat membuat posisi pemegang saham menjadi kuat dan dapat mempengaruhi secara signifikan manajemen laba.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai *t* hitung kepemilikan saham managerial sebesar 0,932 dengan nilai signifikansi 0,359 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh managerial tidak secara signifikan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajemen perusahaan tidak secara langsung mempengaruhi manajemen laba karena jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen kunci perusahaan relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kepemilikan investor yang

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif pada tabel yang menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan saham manajerial pada perusahaan properti dan real estat di Indonesia hanya sebesar 0,088% dari seluruh saham yang beredar. Hal ini sependapat dengan pendapat Agustia (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak bisa membatasi terjadinya manajemen laba dengan manajer yang memiliki kepemilikan saham akan cenderung mengambil kebijakan untuk mengelola laba dengan sudut pandang investor, misalnya dengan meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal. Namun hal ini tidak sejalan dengan Anggana dan Prastiwi (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajemen atas saham berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dengan semakin banyaknya saham yang dimiliki manajemen maka praktik manajemen laba akan menurun karena pihak manajemen akan meningkatkan nilai sahamnya bukan dengan cara praktik manajemen laba.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t hitung kualitas audit sebesar -2,160 dengan nilai signifikansi 0,039 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara kualitas audit terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin baik kualitas audit maka kontrol atas manajemen akan semakin besar sehingga praktik manajemen laba akan berkurang. KAP big four memiliki lebih banyak pengalaman karena telah menangani banyak klien yang dapat dilihat dari pendapatan jasa yang didapatkannya. Dengan bekal pengalamannya tersebut KAP big four menentukan standar materialitas dan mengetahui peluang-peluang manajemen laba lebih banyak dibandingkan KAP non big four. Selain itu KAP big four dianggap lebih berkualitas dan lebih cenderung untuk berhati-hati dalam melakukan prosedur audit yang telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Oleh karena itu KAP big four berpengaruh untuk meminimalisir dan menemukan adanya potensi manajemen laba di perusahaan. Hal ini juga sependapat dengan Fitria (2013) yang mengemukakan bahwa pengaruh signifikan antara pengaruh kualitas audit dan manajemen laba.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t hitung ukuran perusahaan sebesar -0,045 dengan nilai signifikansi 0,964 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Penelitian ini melihat bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki

dorongan untuk melakukan manajemen laba karena perusahaan dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Selain itu, perusahaan besar lebih memiliki basis stakeholder yang lebih luas, sehingga perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dan perhatian yang lebih besar oleh berbagai pihak untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih kredibel. Selain itu perusahaan besar akan lebih mudah untuk memperoleh pendapatannya tanpa harus melakukan manajemen laba seperti perusahaan yang lebih kecil. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t hitung sebesar -0,146 dengan nilai signifikansi 0,885 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050, maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya komposisi komisaris independen bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektifitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan tetapi efektifitas mekanisme pengendalian tergantung kepada nilai dan norma. Selain itu perusahaan-perusahaan di Indonesia diikat oleh UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perusahaan publik memiliki 30% komisaris independen. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha mengikuti regulator untuk menghindari sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tsani (2011).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Variabel komisaris independen, kepemilikan instisional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan ukuran perusahaan dengan nilai dari adjusted R^2 sebesar 19% dan masih terdapat 81% faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen laba.

Hasil pengujian variabel komisaris independen menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,146 dan nilai signifikansi sebesar 0,885. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengujian variabel kepemilikan instisional menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,232 dan nilai signifikansi sebesar 0,818. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan instisional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengujian variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,932 dan nilai signifikansi sebesar 0,359. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

kepemilikan managerial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Hasil pengujian variabel kualitas audit menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,160 dan nilai signifikansi sebesar 0,039. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini berarti jika kualitas audit lebih baik, maka praktik manajemen laba akan berkurang dan pengujian variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,045 dan nilai signifikansi sebesar 0,964. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

5.2. Saran

Bagi emiten diharapkan lebih meningkatkan *good corporate governance* di dalam lingkungan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai visi misi. Bagi investor diharapkan dapat ikut serta dalam memantau kegiatan operasional perusahaan bukan hanya menjadi transient investor, sehingga dapat mengawasi perusahaan dalam praktek manajemen laba sehingga informasi yang dilaporkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk analisa secara fundamentalnya. Sedangkan bagi penelitian berikutnya harap menambahkan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktek manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Dian. 2013. *Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage terhadap Manajemen laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 15 No 1

Anggana, Dea R. dan Andri Prastiwi. 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba*. Vol 2 No 3

Anggraini, Anggi Ratna. 2012. *Pengaruh Siklus Hidup dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Vol 1 No 2. 2013

Cahan, F., G. Liu, dan J. Sun. 2008. *Investor Protection, Income Smoothing and informativeness*. Journal of International

Accounting Research 7 (1)

Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan, dan Amy P. Sweeny. 1995. *Detecting Earnings Management*. The Accounting Review Vol 70 No 2

Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Jensen, M.C., & W.H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure*. Journal of Financial Economic, Vol 5 No 4

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2014. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Jakarta

Schroeder, Richard G et al. 2009. *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. USA : John Wiley & Son, Inc.

Tsani, Sofian Riski. 2011. *Pengaruh Kompensasi Bonus, Leverage, Praktik Corporate Governance terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur*. Skripsi. UNS Surakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. Perseroan Terbatas

Watts, R. & Zimmerman, J. 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

